

## **Sambutan Komnas Perempuan Oleh Ninik Rahayu (Wakil Ketua)**

Assalamu'alaikum Wr.Wb, selamat malam dan salam sejahtera.

Terima kasih atas kebersamaan Ibu, Bapak, Saudara/i seperjuangan pada hari ini yang telah ikut berperan serta dalam acara “Memecah Kebisuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan: Mari Rayakan Aktivisme Perempuan yang diprakarsai Komnas Perempuan.

Kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan merupakan amanat UUD Negara RI 1945. Pada malam ini marilah kita merayakan kebersamaan kita untuk memenuhi amanat konstitusional ini dalam konteks perempuan pencari keadilan, setelah bertahun-tahun kita menggumuli dan seharian kita mendiskusikan fakta-fakta kekerasan dan kebisuan para perempuan korban yang masih terjadi sampai saat ini. Selama dasawarsa perjalanan bangsa ini, perempuan Indonesia dalam segenap keberagamannya, terus mencari keadilan dalam berbagai konteks: sebagai korban KDRT di tengah kemiskinan dan keterpencilan; sebagai korban perkosaan oleh aparat Negara yang telah menyalahgunakan kekuasaannya; sebagai perempuan karir yang mengalami pelecehan seksual oleh atasannya; sebagai perempuan dari kelompok minoritas agama, ras atau suku yang penuh keraguan terhadap institusi-institusi besar Negara yang nyaris tidak bersuara ketika mereka mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek hidup sehari-harinya. Kondisi-kondisi spesifik perempuan-perempuan ini tidak hanya perlu mendapatkan perhatian khusus tetapi membutuhkan dukungan semua pihak. Dukungan penuh telah diberikan para perempuan pemimpin di berbagai wilayah, tetapi tetap upaya konkrit serta komitmen semua warga bangsa, utamanya para pemimpin negeri ini agar keadilan yang diamanatkan oleh konstitusi kita adalah keadilan yang sama bagi semua, termasuk perempuan korban.

Komnas Perempuan sebagai institusi nasional yang dibentuk pada tahun 1998, atas dasar Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, kini telah melampaui sepuluh tahun pertama keberadaannya. Apa yang telah dicapai selama satu dasawarsa bekerja?. Selama 10 tahun ini, Komnas Perempuan ikut menjadi bagian dari upaya bangsa untuk membebaskan diri dari belenggu sistem kuasa sebuah rejim yang secara sistematis telah membungkam, mengekang dan bahkan membunuh warganya sendiri. Ternyata membongkar bangunan yang telah tertata rapih selama satu generasi penuh— 32 tahun, tepatnya—menuntut kesabaran, ketegaran dan kejelian yang luar biasa di hadapan dinamika 'satu langkah maju dan dua langkah mundur'. Apa esensinya? Dari realita pembungkaman, peminggiran dan kekerasan pada rejim Orde Baru, tentu belenggu pertama yang harus bongkar adalah soal apa yang diterima oleh bangsa dan negara kita sebagai 'kebenaran'. Tigapuluh tahun lamanya kita, sebagai bangsa, hidup dalam kegelapan tentang apa yang terjadi dalam rumah kita sendiri dan tentang apa yang dilakukan atas nama kita semua terhadap orang-orang terpinggirkan termasuk perempuan korban yang tak kuasa membela diri.

Menyikapi ini, Komnas Perempuan mendedikasikan kerja-kerjanya untuk memecahkan kebisuan perempuan korban kekerasan dengan mendokumentasikan pengalaman mereka dan menerbitkannya, melaporkannya pada public dan pemerintah. Melalui laporan-laporannya, Komnas Perempuan menyatakan bahwa, dari suara korban, bangsa Indonesia telah memperoleh sebuah kebenaran. Selanjutnya, tugas kita sebagai bangsa adalah untuk menyimaknya secara serius dan

mengambil langkah nyata untuk mendukung keadilan dan pemulihan bagi korban dan memastikan bahwa apa yang mereka alami tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang.

Ibu, Bapak, Saudara/i, kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati,  
Apa sesungguhnya capaian bangsa ini setelah 10 tahun reformasi? Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam sepuluh tahun masa reformasi yang dimulai pada saat berakhirnya otoritarianisme Orde Baru. Tiga landasan bagi penegakan hak asasi manusia dan demokrasi telah dibangun melalui tiga kali pelaksanaan pemilu yang sukses; pengintegrasian HAM ke dalam konstitusi nasional; ratifikasi beberapa kovenan dan konvensi internasional; dan dengan didirikannya beberapa institusi pelengkap negara baru yang bersifat independen yang berfungsi sebagai mekanisme *check-and-balance* bagi upaya pemenuhan hak asasi manusia, keadilan, dan pelaksanaan pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Partisipasi seluruh warga negara secara aktif dan setara dalam semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dibutuhkan untuk menjamin agar landasan tersebut menghasilkan perubahan yang berarti bagi perdamaian abadi, keadilan, dan martabat manusia pada dekade kedua reformasi di Indonesia. Salah satu capaian dari 10 pertama masa reformasi adalah pendokumentasian berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Tetapi, selama sepuluh tahun ternyata tidak hanya capaian, tetapi ada kemunduran dan kemandekan. Sebuah kemunduran karena Komnas Perempuan mencatat munculnya 154 kebijakan yang secara khusus bersifat diskriminatif terhadap perempuan, umumnya berupa kebijakan local, dan bertambah satu dengan berlakunya UU Pornografi yang sangat kontroversial. Kaum perempuan dan kelompok minoritas telah dijadikan tumbal oleh oportunisme telanjang para elit politik yang sedang membuat anjang-angannya masing-masing dalam proses kepemimpinan nasional. Lagi-lagi seksualitas perempuan dikriminalisasi demi kemenangan politik mereka. Moralitas dan agama telah dijadikan komoditi politik, identitas sosial kita dipermainkan, dan integritas bangsa dipertaruhkan. Bukan suatu kebetulan jika dikatakan bahwa perempuanlah korban pertama dari semua ini, mengingat demokrasi hanya dimaknasi secara procedural oleh para pemangku kepentingan. Juga ada kemandekan karena bangsa ini masih punya hutang besar kepada kaum perempuan korban kekerasan dalam konteks konflik dan pelanggaran HAM masa lalu. Tiga dekade rezim Orde Baru dan paruh pertama era reformasi telah dipenuhi oleh berbagai peristiwa kekerasan politik yang berskala massal di mana perempuan adalah korban yang lebih sering membisu. Upaya untuk mendukung pemulihan korban secara komprehensif, untuk membantu mereka keluar dari jeratan belum sepenuhnya dilakukan oleh Negara.

Ibu-ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara, serta kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati, Aktivisme perempuan memainkan peran besar dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban. Aktivisme perempuan juga memerankan peran penting dalam mencegah terulangnya kekerasan, terhadap perempuan. Tentu bukan menggapai mimpi, tapi kita bersama sedang bekerja dan bergandeng tangan memastikan bahwa setiap perempuan korban kekerasan bisa mendapatkan keadilan dan pemulihan, apalagi untuk menjamin bahwa anak-cucu kita akan hidup bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi mulai hari ini dan dimasa yang akan datang. Akhirnya, tidak terbatas pada kita yang hadir pada acara ini, tetapi segenap warga bangsa perlu memberikan apresiasi terhadap perjuangan dan kerja para aktivis perempuan yang tak kenal lelah. Marilah kita rayakan aktivesme perempuan: Memecah Kebisuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan.